

KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA

Akbar Pandu Dwinugraha

Program Studi Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang

Email: akbar.dwi@unmer.ac.id

Abstract

This study looks at the leadership of the village head in building communication, direct relationships and the formulation of authority and responsibility in the administration of village governance. This type of combination research was used in this study which resulted in the conclusion that most of the leadership of the village head with stakeholders including traditional leaders, religious leaders, community leaders, women's groups, BPD and LPMD had been going well. Although the process of building good relations with former political opponents was still an obstacle, especially in the original village cluster. Second, the decision making of the village heads in the three village clusters was of various types where the first cluster seemed liberal, middle democratic and continued democratic-autocratic. Third, information accountability such as direct relationship between the village head and subordinates as well as the community in the three village clusters has been well established in terms of providing information, coordination, openness and transparency, although community trust in openness and transparency is seen as good only in villages with advanced clusters. Fourth, the formulation of powers and responsibilities of village heads in the three village clusters shows that the higher the village cluster the formulation of authority is more focused on the figure of the village head.

Article Histori:

Accepted: 25/9/2020

Review: 29/9/2020

Publish: 31/10/2020

Keyword: *Leadership, politic, village, governance*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan setiap enam tahun sekali menyesuaikan enam tahun masa jabatan Kepala Desa. Kepala Desa diharapkan memiliki legitimasi yang kuat karena dia dipilih langsung oleh masyarakat desa. Seorang Kepala Desa yang tidak legitimate, akan sulit mengambil keputusan fundamental. Sedangkan kepala desa yang mendapatkan legitimasi yang kuat akan ditopang dengan modal politik yang kuat, yang berbasis pada modal sosial, bukan politik uang. Ongkos transaksi ekonomi pada saat Pilkades akan sangat rendah jika seorang calon kepala desa memiliki modal sosial yang kuat. Legitimasi dari hasil modal sosial yang kuat akan memunculkan kepemimpinan politik

kepala desa yang inovatif dan progresif. Ia akan mampu bekerja dengan mengedepankan partisipasi.

Partisipasi dimaknai sebagai pelibatan warga dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Partisipasi berarti membuka ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil dan terutama kaum perempuan karena Partisipasi kaum perempuan dalam hal mendapatkan pembinaan kemasyarakatan desa merupakan tugas dan tanggung jawab kepala desa (Dwinugraha,2019).

Kepemimpinan Politik kepala desa juga menentukan interaksi antar kelompok

kepentingan di desa tersebut. Interaksi antar aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipengaruhi oleh sinergitas antar aktor kepentingan (Dwinugraha,2017). Sinergitas tersebut perlu dibangun oleh kepemimpinan politik yang baik dari kepala desa. Sinergitas tersebut akan membangun kesediaan aktor kepentingan untuk ikut berpartisipasi.

Kepemimpinan Politik kepala desa juga akan menentukan keberhasilan dalam menjalankan alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau yang sering disebut dengan ADD merupakan terobosan dari pemerintah berupa pengalokasian sejumlah dana ke setiap desa yang secara terpadu bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa (Dwinugraha, 2012)

Setelah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Tentang Desa disahkan, masing-masing desa telah bersiap menyongsong pemilihan kepala desa serentak. Implikasi lain dari disahkannya peraturan daerah tentang desa tersebut yaitu desa-desa di Kabupaten Malang diwajibkan untuk mandiri dalam pengelolaan pembangunan desa. Maka kepemimpinan politik kepala desa yang baik merupakan keniscayaan. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan gambaran kepemimpinan politik kepala desa di Kabupaten Malang.

2. KAJIAN LITERATUR

Bass (1990) mengartikan suatu kepemimpinan sebagai aktivitas para pemegang kekuasaan dan pembuat keputusan. Lebih lanjut menurut Siagian (2003) kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu: (1) proses kepemimpinan dan karakter pemimpin; (2) hasil kepemimpinan; dan (3) sumber kekuasaan. Proses kepemimpinan tak berubahnya ketika membahas kepemimpinan

demokratis sebagaimana menurut Lord (1991) yang menganggap kekuasaan dibagi dengan orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia. Keberadaan demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme penentuan pemimpin, tetapi juga bergantung pada adanya pemimpin yang berkepribadian demokratis. Dalam hal ini, pemimpin yang mempertahankan dan menyempurnakan nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk di dalamnya kemampuan menahan diri dalam menggunakan kekuasaan. Demokrasi bukanlah pemerintahan oleh beberapa orang elit, tetapi pemerintahan oleh beberapa pemimpin.

Selanjutnya sumber kekuasaan yang merupakan dimana dan bagaimana kepemimpinan tersebut didapat. Lebih jauh lagi menurut Bass (2003) kepemimpinan berdasarkan sumber kekuasaan dibagi tiga, mereka meliputi kepemimpinan rasional, tradisional, dan kharismatik. Kepemimpinan rasional yang bersumberkan kewenangan legal beranjak dari legalitas pola-pola peraturan normatif, dan hak orang-orang yang terpilih memiliki kewenangan berdasarkan peraturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Kepemimpinan tradisional bersumberkan kewenangan tradisional, yang beranjak dari kepercayaan yang sudah mapan terhadap tradisi dan legitimasi orang yang memiliki kewenangan berdasarkan tradisi yang dianggap keramat tersebut. Lain halnya dengan kepemimpinan kharismatik yang berpegang pada kekaguman masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki kelebihan yang luar biasa (Conger,1989). Maka dari itu pemimpin dengan pendekatan karismatik perlu untuk mentransfer karisma kepada penggantinya untuk memastikan keberlanjutan organisasinya (Bryman,1992)

Mintzberg (2004) menjelaskan bahwa pemimpin memiliki peran yang terbagi menjadi tiga sifat yang meliputi (1) peranan yang bersifat interpersonal. Sifat interpersonal terdiri dari tiga macam peranan pemimpin yang meliputi *figurehead*, *leader* dan komunikator. *Figurehead* lebih kepada peran seorang pemimpin yang diharuskan untuk tampil dalam berbagai kegiatan resmi. *Leader* diartikan sebagai penggerak yang mampu memberikan motivasi terhadap bawahan melalui kecapakan komunikasi. Komunikator diartikan sebagai penghubung dalam upaya membangun kerjasama dengan berbagai pihak. (2) Peranan yang bersifat Informasional yang lebih mengarah kepada proses seseorang menerima dan menyampaikan informasi sehingga seorang pemimpin mampu berperan sebagai pemonitor, dissiminator dan juru bicara. Terakhir adalah (3) peranan sebagai pengambil keputusan. Sebagai pengambil keputusan pemimpin dapat berperan sebagai pengatur segala macam sumberdaya yang ada.

Berdasarkan ketiga peran pemimpin menurut Henry Mintzberg tersebut dapat dirumuskan beberapa aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang meliputi komunikasi, pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selain itu dalam peranan informasional aspek terpenting adalah akuntabilitas informasi dari seorang pemimpin.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi (*Mix Methode*). Jenis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Creswell: 2009). Lokasi penelitian adalah wilayah administratif Kabupaten Malang dengan waktu pengumpulan data pada periode bulan September-Desember 2017.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dengan metode kluster sampling. Klusterisasi tersebut meliputi kluster Kecamatan Kepanjen, Gondanglegi dan Pagak. Klusterisasi desa yang menjadi sasaran lokasi penelitian adalah didasarkan kepada Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dimana desa dibagi kedalam tiga kluster yang meliputi kluster mula, madya dan lanjut. Berdasarkan pembagian tersebut dipilihlah lokasi yang meliputi kluster Kecamatan Kepanjen yang meliputi Desa Ngadilangkung, Dilem, Mangunrejo, Jenggolo dan Sengguh. Kluster Kecamatan Pagak meliputi Desa Pagak, Sumberejo dan Gampingan. Serta kluster Kecamatan Gondanglegi yang meliputi Desa Gondanglegi Kulon, Gondanglegi Wetan, Putat Lor dan Desa Urek-urek.

kuesioner yang digunakan menggunakan kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala likert yang disusun menyesuaikan fokus penelitian yang meliputi aspek komunikasi, pengambilan keputusan, akuntabilitas informasi dan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data yang diperoleh dari masyarakat (responden) melalui pengisian kuesioner, observasi lapangan langsung serta wawancara dengan masyarakat.

Analisis data dibagi menjadi beberapa tahap meliputi. Pertama, kuesioner yang telah diisi dilakukan kodifikasi kedalam klusterisasi desa. Kedua, kuesioner yang telah dikoding tersebut diinput dengan penyesuaian indikator fokus penelitian dan kategori skala likert yang meliputi tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering dan sangat sering. Ketiga, data tersebut dilakukan tabulasi yang menggambarkan

kondisi eksisting terhadap topik yang diteliti untuk dihasilkan analisis lebih lanjut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang perlu dibangun oleh kepala desa, komunikasi dalam hal ini dapat dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang dibangun oleh kepala desa bersama dengan perangkat desa dan masyarakat dalam fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam mendukung tugasnya melaksanakan pemerintahan desa.

Salah satu kegiatan formal yang membutuhkan komunikasi dari kepala desa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Bentuk komunikasi yang dibangun oleh kepala desa diantaranya adalah intensitas komunikasi yang dibangun oleh kepala desa bersama dengan tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, BPD dan LPMD serta lawan politik terdahulu sebagaimana table 1 berikut.

Tabel 1 Analisis Unsur Komunikasi Kepala Desa

Intensitas Kepala desa menjalin kerjasama, komunikasi dan koordinasi	Di Desa Mula (%)					Di Desa Madya (%)					Di Desa Lanjut (%)				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
Bersama "tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat	10	27	33	30	0	5	20	33	42	0	0	18	43	39	0
kelompok perempuan	17	25	33	17	8	14	21	29	29	7	0	25	42	25	8
BPD dan LPMD	0	25	38	31	6	0	20	33	40	7	0	6	31	38	25
Lawan Politik Terdahulu	22	43	21	14	0	16	42	21	21	0	0	45	33	22	0

:

TP: Tidak Pernah, J : Jarang, KK: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Sangat Sering

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa komunikasi kepala desa dengan tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat di desa mula tergolong sedang, berbeda dengan kondisi yang terjadi di desa madya yang tergolong intensitas komunikasinya tinggi. Sedangkan komunikasi yang terjadi di desa dengan klaster lanjut tergolong sama dengan desa mula yaitu tergolong sedang.

Komunikasi politik kepala desa bersama kelompok perempuan di desa mula tergolong rendah yang memiliki arti kepala desa jarang dalam menjalin kerjasama dengan aktor tersebut, hal ini tidak berbeda dengan kondisi komunikasi politik yang terjadi di desa madya, berbeda dengan dua klaster desa sebelumnya kondisi

komunikasi kepala desa bersama kelompok perempuan di desa lanjut tergolong sedang

komunikasi bersama dengan lembaga desa yang terjadi di desa mula tergolong sedang. Berbeda dengan yang terjadi di desa madya dan desa lanjut yang mana komunikasi yang terbangun antara kepala desa dengan lembaga desa tergolong tinggi.

Kondisi komunikasi politik yang terjadi antara kepala desa dengan lawan politiknya terdahulu didominasi jarang dilakukan. Hal tersebut terjadi di desa dengan klaster mula, madya maupun lanjut. Kondisi ini menjadi hal yang terkesan biasa terjadi di desa desa yang menjadi lokasi riset peneliti. Pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa



sebenarnya tetap menjalin hubungan baik dengan pihak yang berasal dari lawan politik terdahulu walaupun mereka memahami bahwa perasaan bisa menerima atau legowo membutuhkan waktu yang juga relatif.

Data dilapangan menyebutkan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi pendukung calon kepala desa yang kalah untuk bisa legowo menerima situasi yang ada berbeda-beda. Pada klaster desa mula adalah sekitar tiga tahun, untuk desa madya sekitar dua tahun dan di desa mula adalah satu tahun. hal tersebut dipengaruhi oleh budaya dan orientasi politik masyarakat di masing masing klaster desa. Disini terlihat jelas bahwa semakin tinggi

kondisi klaster desa, semakin cepat pula masyarakat yang menjadi pendukung calon kepala desa yang kalah untuk bisa legowo.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan faktor berikutnya yang menjadi penting dalam menganalisis kepemimpinan politik Kepala Desa. Pengambilan keputusan kepala desa dilihat dari aspek yang meliputi kesediaan dalam menerima saran dari bawahan dan masyarakat, intensitas mengatur bawahan sesuai keinginan, upaya menselaraskan tujuan bersama bawahan dan masyarakat serta pendelegasian wewenang kepada bawahan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2 Analisis unsur Pengambilan Keputusan Kepala Desa

Intensitas Kepala desa	Di Desa Mula (%)					Di Desa Madya (%)					Di Desa Lanjut (%)				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
menerima saran dari bawahannya dan masyarakatnya	14	36	43	7	0	13	20	34	33	0	0	17	50	33	0
mengatur bawahan sesuai dengan keinginannya	0	9	27	46	18	0	8	31	61	0	0	27	53	2	0
menselaraskan tujuan bersama bawahan dan masyarakat	12	29	35	12	12	0	14	38	29	19	0	15	35	31	19
memberikan semua tanggung jawab kepada bawahannya	19	43	24	14	0	6	53	23	18	0	0	12	47	23	18

Keterangan:

TP: Tidak Pernah, J : Jarang, KK: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Sangat Sering

kondisi kepala desa dalam menerima saran dari bawahannya yang ada di desa dengan klaster mula tergolong rendah atau bisa diartikan terkesan jarang atau malah tidak pernah menerima saran dari bawahannya dan masyarakatnya. Berbeda halnya dengan desa madya yang tergolong sedang atau bisa diartikan lumayan dalam hal intensitas menerima saran dari bawahan dan masyarakatnya. Kondisi yang terjadi di desa lanjut tidak jauh beda dengan yang terjadi pada desa madya meski dominasi persentase lebih tinggi di desa lanjut

intensitas kepala desa di desa dalam klaster mula, mengatur bawahan sesuai dengan keinginannya tergolong tinggi yang terjadi pula di desa madya. Tetapi yang menarik adalah kondisi yang terjadi di desa lanjut intensitas kepala desa mengatur bawahan sesuai keinginannya tergolong sedang.

keselarasan tujuan yang terjalin antara kepala desa dengan bawahan dan masyarakatnya di desa dalam klaster mula tergolong rendah, hal tersebut berarti terdapat kecenderungan ketidak selarasan

antara tujuan yang hendak dicapai oleh pimpinan, bawahan dan masyarakatnya. Tetapi berbeda halnya dengan yang terjadi pada desa madya dan desa lanjut. Dua klaster desa ini masih tergolong tinggi tingkat keselarsan yang terjalin antara kepala desa dengan bawahan dan masyarakatnya. Hal ini bisa diartikan bahwa dalam dua klaster desa tersebut kecenderungan keselarsan tujuan antara kepala desa dengan bawahan dan masyarakatnya berjalan dengan selaras

intensitas dari kepala desa dalam memberikan tanggung jawab kepada bawahannya tergolong rendah. Hal tersebut terjadi di desa dengan klaster mula dan madya. Hal ini bisa diartikan bahwa tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tetap dipegang penuh oleh kepala desa dan kecenderungan dalam pembaguan tanggungjawab kepada bawahan tergolong rendah. Berbeda halnya dengan yang terjadi di klaster desa lanjut yang mana intensitas dari kepala desa dalam memberikan semua tanggungjawab kepada bawahannya tergolong sedang, hal tersebut bisa diartikan bahwa tercapat kecenderungan kepala desa memberikan keleluasaan kepada bawahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa hal yang terjadi diatas berdasarkan hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif dipengaruhi oleh beberapa faktor diataranya adalah karakter masyarakat di desa mula lebih bersifat tradisional yang tidak dimungkinkan untuk

dibiarkan begitu saja tanpa instruksi dari pimpinan. Berbeda dengan desa madya yang tipe karakteristik masyarakatnya sudah dalam klaster yang campuran, yaitu sebagian adalah masyarakat tradisional dan sebagian lagi adalah masyarakat yang lebih modern atau lebih berkembang karena berasal dari pindahan perkotaan. Meskipun berdasarkan hasil wawancara jumlah masyarakat tradisional masih mendominasi di klaster desa tersebut. Untuk desa dengan klaster lanjut, masyarakat yang tinggal di desa tersebut berkarakteristik modern, jenis mata pencaharian yang mereka punya adalah berorientasi kepada jasa dan industri. Masyarakat desa lanjut sudah dalam tataran orientasi politik yang baik dan menjadi keuntungan bagi pemimpin di desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Akuntabilitas Informasi

Faktor berikutnya yang digunakan untuk menganalisis kepemimpinan politik kepala desa adalah faktor akuntabilitas informasi. Akuntabilitas Informasi dalam hal ini adalah hubungan yang dibangun secara langsung antara kepala desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, bentuk koordinasi langsung dari kepala desa dengan masyarakat, serta bentuk keterbukaan dan transparansi penggunaan anggaran pemerintahan desa yang dideseminasikan kepada masyarakat desa. Hal tersebut akan dijabarkan melalui tabel berikut ini.

Tabel 3 Analisis Unsur Akuntabilitas Informasi Kepala Desa

Intensitas Kepala desa	Di Desa Mula (%)					Di Desa Madya (%)					Di Desa Lanjut (%)				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat	29	18	35	12	6	8	17	42	25	8	0	10	33	43	14
Berkoordinasi langsung dengan masyarakat tentang pembangunan desa	5	9	48	33	5	6	12	35	29	18	0	9	45	41	5



Intensitas Kepala desa	Di Desa Mula (%)					Di Desa Madya (%)					Di Desa Lanjut (%)				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
Terbuka dan transparan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa	8	17	42	33	0	6	19	44	31	0	5	10	32	42	11

Keterangan:

TP: Tidak Pernah, J : Jarang, KK: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Sangat Sering

Intensitas kepala desa memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat desa tentang pelaksanaan pemerintahan desa di klaster desa mula tergolong dalam tataran rendah yang berarti terdapat kecenderungan bahwa masyarakat di desa mula masih belum mempercayai secara penuh terhadap kepemimpinan dari pada kepala desa di desanya, berbeda halnya dengan yang terjadi di desa madya bahwa intensitas pemerian informasi dari Kepala Desa ke masyarakat tergolong dalam tataran sedang yang berarti terdapat kecenderungan yang aman yaitu sisi kepercayaan masyarakat relatif terjaga. Sedangkan yang terjadi di desa dalam klaster lanjut, intensitas pemberian informasi secara langsung kepada masyarakat tergolong tinggi atau bisa diartikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi oleh Kepala Desa dalam keadaan baik.

kondisi intensitas kepala desa dalam mengkoordinasikan secara langsung pembangunan secara partisipatif kepada masyarakat di desa dalam klaster mula tergolong kadang-kadang. Berbeda halnya dengan desa dalam klaster madya dan lanjut yang mana intensitas koordinasi yang dibangun oleh kepala desa dan masyarakat dalam membahas pembangunan desa tergolong sering. Hal yang terjadi di desa dalam klaster mula sudah sangat baik bahwa masyarakat berpresepsi bahwa kepala desa telah melakukan koordinasi secara langsung bersama masyarakat meskipun persepsi tersebut tidak sebaik yang terjadi di desa dalam klaster madya dan lanjut. Hal tersebut dikarenakan bentuk

orientasi politik dari masyarakat dan kepala desa yang berbeda-beda di setiap desanya.

Kepala desa di desa mula sebenarnya memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik tetapi orientasi budaya politik masyarakatnya masih tergolong tradisional, berbeda dengan desa dalam klaster madya yang memiliki karakter masyarakat yang campuran antara tradisional dengan yang lebih moderat. Kondisi karakter masyarakat di desa lanjut dipengaruhi oleh letak daripada desa tersebut yang mendekati pusat kota yang mana karakter mereka sudah tidak lagi tradisional tetapi telah modern yang mana mata pencaharian mereka didominasi dalam bidang jasa dan perdagangan.

kondisi keterbukaan dan transparansi tertinggi berada di desa dalam klaster lanjut. Untuk desa dalam klaster mula dan madya, kondisi intensitas kepala desa dalam mengedepankan keterbukaan dan transparansi tergolong sedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa di lokasi penelitian, keterbukaan dan transparansi dari kepala desa merupakan faktor yang penting bagi kepala desa meskipun dia (kepala desa) tidak mengerti secara penuh tentang pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut masyarakat desa relatif membutuhkan sosok kepala desa yang jujur dalam hal penggunaan anggaran keuangan desa.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab merupakan bentuk hal

yang seringkali dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa atau bawahannya. Bentuk pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam hal ini mencoba

untuk melihat sejauh mana pemberian mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada perangkat desa sebagaimana table 4 berikut.

Tabel 4 Analisis Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Intensitas Kepala desa	Di Desa Mula (%)					Di Desa Madya (%)					Di Desa Lanjut (%)				
	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS	TP	J	KK	S	SS
memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban yang lain kepada perangkat desa	19	25	37	6	13	18	18	27	37	0	6	13	50	31	0

Keterangan:

TP: Tidak Pernah, J : Jarang, KK: Kadang-kadang, S: Sering, SS: Sangat Sering

Berdasarkan Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa intensitas mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban yang lain kepada perangkat desa yang terjadi di desa mula didominasi responden yang memilih jarang dan tidak pernah, berdasarkan hal tersebut intensitasnya tergolong rendah. Hal tersebut berarti kepala desa di desa mula berkecenderungan tidak memberikan mandat dan tugas lain selain yang telah diatur oleh perundang-undangan. Berbeda kondisi dengan yang terjadi di desa dalam klaster madya, bahwa dominasi responden memilih sering. Hal ini berarti intensitas kepala desa dalam hal tersebut tergolong tinggi. Setelah diteliti lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif, kepala desa di desa klaster madya memberikan mandat dan tugas kewajiban lain dalam hal peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. salah satu desa dalam klaster madya membuka pelayanan di sore hari dengan petugas jaga yang bergantian sesuai dengan jadwal yang telah diinstruksikan oleh kepala desa. Hal ini termasuk hal lain tetapi menunjang tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. kondisi yang terjadi di desa dalam klaster lanjut juga berbeda, kebanyakan responden memilih kadang-kadang yang berarti tergolong sedang, hal tersebut muncul sebagai hasil dari

pengamatan masyarakat bahwa kepala desa mereka tidak terlalu banyak memberikan instruksi. Tetapi kepala desa di desa dalam klaster lanjut memang diuntungkan dengan orientasi budaya politik dan sisi kemoderatan dari masyarakatnya yang berbeda dengan klaster desa madya dan mula yang cenderung tradisional dan campuran.

5. PENUTUP

Sebagian besar Kepemimpinan kepala desa bersama stakeholder yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, BPD da LKD telah berjalan dengan baik. Sayangnya proses membangun hubungan baik dengan mantan lawan politik terdahulu masih menjadi kendala terutama di klaster desa mula. Kedua, pengambilan keputusan kepala desa di tiga klaster desa memiliki tipe yang beragam dimana klaster mula terkesan liberal, madya demokratis dan lanjut demokratis-otokratis. Ketiga, akuntabilitas informasi antara kepala desa dengan bawahan serta masyarakatnya di tiga klaster desa telah terbangun dengan baik dalam hal pemberian informasi, koordinasi, keterbukaan dan transparansi. Sayangnya kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan dan transparansi hanya terbangun di desa dengan klaster lanjut.

Keempat, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepala desa di tiga klaster desa ditemukan pola bahwa semakin tinggi klaster desa perumusan wewenang semakin terpusat dan dominan pada kepemimpinan kepala desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bass, M. Bernard, (1990). *Bass & Stragdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications (3rd ed)*. New York: The Free Press
- Bass, M. Bernard, Bruce J. Avolio, Dong I Jung, Yair Benson. (2003) *Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership*. *Journal of Applied Psychology* Vol 88 Iss 2
- Bryman,A. (1992) *Charisma and Leadership in Organizations*. London: Sage
- Conger, JA (1989). *The Charismatic Leader: Behind The Mistique of Exceptional Leadership*. San Francisco, CA: Jossey Bass
- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad Fawaid.
- Dwinugraha, Akbar Pandu, (2012). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)*. Malang: Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Dwinugraha, Akbar Pandu, (2017). *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Volume2,Nomor 1, April 2017
- Dwinugraha, Akbar Pandu, (2019). *Kaum Perempuan dan Partisipasinya dalam Pemerintahan Desa*. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019
- Lord, R.G. and Maher, K.J. (1991) *Leadership and Information Processing: Linking Perceptions and Performance*. Unwin-Hyman, boston.
- Mintzberg, Henry. (2004) *Leadership and Management Development: an Afterword*, *The Academy of Management Executive*, Vol. 18, No. 3 (august, 2004), 140-142
- Siagian, Sondang P. (2003). *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan